



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/8425>

## KEDUDUKAN ETNIS TIONGHOA DALAM MULTIKULTURALISME INDONESIA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Yeni Wijayanti

Universitas Galuh, Indonesia

Email Koresponden: [yeniunigal@gmail.com](mailto:yeniunigal@gmail.com)<sup>3</sup>

*Sejarah Artikel: Diterima Juli 2022, Disetujui: Agustus 2022, Dipublikasikan: September 2022*

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia yang multi etnis. Dikotomi pribumi (warga negara asli) dan nonpribumi (warga negara keturunan Tionghoa) muncul sejak masa Kolonial Belanda yang akhirnya sampai sekarang masih disematkan di bumi pertiwi. Tujuan penelitian literatur ini untuk mengungkapkn tentang kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode Sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka atau literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia masih ada yang mengalami diskriminasi walaupun pemerintah berupaya mempersatukan semua suku bangsa. Rezim berganti rezim setelah penjajahan hilang dari Indonesia, namun gap antara etnis Tionghoa dengan penduduk asli masih ada walau pernah dilakukan upaya asimilasi dan integrasi. Ini terlihat ketika terjadi krisis, etnis Tionghoa sering menjadi sasaran kemarahan penduduk asli.

**Kata Kunci:** Etnis, Tionghoa, Multikulturalisme, Indonesia

### Abstract

This paper examines the position of the ethnic Chinese in multi-ethnic Indonesia. The dichotomy of natives (original citizens) and non-natives (citizens of Chinese descent) emerged since the Dutch colonial period, which is finally still embedded in the motherland. The purpose of this literature research is to reveal the position of the Chinese ethnicity in Indonesia. The method used is the historical method which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data collection techniques are carried out using literature or literature studies. The research findings show that there are still ethnic Chinese in Indonesia who experience discrimination even though the government is trying to unite all ethnic groups. Regimes changed after colonialism disappeared from Indonesia, but the gap between the ethnic Chinese and the indigenous population still exists despite assimilation and integration efforts. This can be seen when a crisis occurs, ethnic Chinese are often the target of anger from the native population.

**Keywords:** Ethnic, Chinese, Multiculturalism, Indonesia

### PENDAHULUAN

Dikotomi mayoritas-minoritas, superior-inferior rentan menjadi

konsumsi bagi kalangan tertentu demi kepentingannya yang dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu, pemahaman dan kemauan mengapresiasi

multikultural bangsa Indonesia sangat diperlukan. Pihak mayoritas harus tahu bahwa tanpa minoritas, mereka bukanlah mayoritas. Artinya, eksistensi mayoritas (superior) karena adanya pihak minoritas atau inferior (Shofa, 2016). Sebenarnya konsep minoritas berasal dari politik liberal. Pada dasarnya, liberalisme mengakui individu sebagai pemangku kedaulatan dalam berdemokrasi, sedangkan minoritas meletakkan pada kelompok. Multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari konsep pluralisme.

Pluralisme bukan sesuatu yang “given” tetapi sesuatu yang didapat dari proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas (Hanafy, 2015). Multikulturalitas bangsa Indonesia merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari. Beragam budaya, bahasa, suku, serta agama berkembang di Indonesia. Multikulturalisme bukan hanya menuntut kebersamaan tetapi juga menghargai perbedaan antar budaya, antar agama, dan antar etnik. Multikulturalisme lebih dipahami sebagai pemahaman, penghormatan, dan penghargaan pada budaya lain.

Masalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan masalah yang cukup menarik dan tidak ada habisnya untuk dikaji. Selain masalah identitasnya, orang keturunan Tionghoa juga dianggap sebagai satu kelompok ekonomi kuat yang melebihi orang-orang Indonesia asli. Mereka terutama dominan dalam bidang perdagangan dan pada tingkat yang lebih kecil, dalam bidang keuangan dan industri. Keberhasilan mereka tentunya tidak terlepas dari sifat mereka yang rajin, kerja keras, tekun dan ulet. Di sisi lain, posisi orang-orang Tionghoa sering terjepit dan menjadi kambing hitam pada suatu kondisi tertentu, misalnya saat terjadi kerusuhan 1998. Saat itu, banyak orang Tionghoa yang menjadi korban tindak perampasan, pembakaran, pemerkosaan, dan lainnya.

Hal itu dipengaruhi oleh stereotip negatif orang-orang Tionghoa. Tionghoa

dianggap lebih suka berkelompok, menjauhkan diri dari pergaulan sosial, dan lebih suka tinggal di kawasan sendiri. Tionghoa hanya mementingkan perdagangan dan bisnis, tidak memiliki kesetiaan yang kuat terhadap Indonesia, oportunistis, mendominasi ekonomi nasional, dan menghalangi kebangkitan nasional (Choppel, 1994). Stereotip ini begitu kuat dikalangan masyarakat yang kemudian mewariskan “dendam” abadi sampai sekarang. Silih bergantinya rezim di Indonesia tidak terlalu berpengaruh pada kondisi dan posisi orang Tionghoa.

Pada masa Orde Baru, jargon Bhinneka Tunggal Ika begitu gencar digaungkan, stabilitas keamanan menjadi prioritas dalam kebijakannya. Namun dalam kenyataannya, pemerintah seperti menerapkan standar ganda. Hal-hal yang terkait dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama dicurigai sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, sehingga yang timbul adalah konflik dimana-mana yang ditangani dengan cara pendekatan politis yang kurang sesuai. Beberapa contoh peristiwa di Sambas, Ambon, Sampit, dan yang lainnya sebenarnya menunjukkan bahwa permasalahan SARA tidak hanya terjadi pada Tionghoa (Hendro, 2013). Kejadian-kejadian tersebut dipicu karena ada gesekan budaya, agama dan etnis antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Setelah Orde Baru digantikan orde reformasi, tindakan diskriminasi terhadap kelompok atau etnis lain justru tidak dilakukan oleh penguasa saja, namun juga oleh sekelompok masyarakat yang membawa identitas tertentu. Kemunculan kekuasaan oligarki kelompok tertentu tersebut mengukuhkan eksistensi mereka dalam negeri ini. Beberapa masalah yang terjadi pada masa reformasi bersinggungan dengan kelompok agama dan juga ras (Fadhli, 2014). Permasalahan ras masih kuat dialami oleh orang-orang Tionghoa. Isu pembauran yang sudah lama diluncurkan pemerintah tidak berhasil karena tekanan yang

dihadapi oleh orang-orang Tionghoa begitu kuat.

Kedudukan semua warga di dalam kehidupan bernegara adalah sama, termasuk orang-orang Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia. Hal ini mengacu pada teori negara hukum bahwa ada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang terjamin dalam konstitusi. Negara hukum di sini tidak hanya menyangkut formil tetapi materiil juga yang responsif terhadap penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada dirinya sejak lahir sebagai martabatnya sebagai manusia (Fadhli, 2013).

Melihat fenomena di atas, tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia menempatkan etnis Tionghoa dalam bingkai multikulturalisme Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan merumuskan masalah tentang bagaimana kedudukan etnis Tionghoa dalam multikulturalisme Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi. *Heuristik* adalah proses pencarian dan pengumpulan sumber. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Data diperoleh dari referensi tertulis seperti buku dan artikel jurnal. Tahap selanjutnya setelah *heuristik*, adalah kritik yaitu tahapan untuk memverifikasi data yang ada. Kritik meliputi kritik intern dan ekstern. Sumber-sumber yang ada diverifikasi. Hal ini terkait dengan adanya stereotip tentang Cina sehingga memerlukan ketajaman kritik. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan Interpretasi. Data yang sudah diverifikasi menjadi fakta. Fakta-fakta inilah yang kemudian ditafsirkan. Yang terakhir adalah tahapan penulisan atau historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Indonesia dalam Bingkai Multikulturalisme

Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. *Founding Father* bangsa menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Pandangan Hefner yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan "*lokus klasik*" (tempat terbaik/ rujukan) bagi konsep masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang unik dimana hanya beberapa wilayah saja di dunia yang dianugrahi keistimewaan ini. Telaah mengenai keberagaman sebuah bangsa kemudian dikenal dengan konsep multikultural. Banyak ahli mengemukakan bahwa konsep multikultural pada dasarnya merupakan konsep harmoni dalam keragaman budaya yang tumbuh seiring dengan kesederajatan di antara budaya yang berbeda. Harmoni ini menuntut setiap individu untuk memiliki penghargaan terhadap kebudayaan individu lain yang hidup dalam komunitasnya. Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) yang menuntut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau

perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain (Lestari, 2015).

Negara secara sadar mendefinisikan diri mereka sebagai negara multikultural dalam arti bahwa mereka tidak hanya mentolerir tetapi juga menerima banyak budaya minoritas dan memberikan beberapa komitmen konstitusional untuk tujuan ini. Pada saat yang sama, kohesi dan keharmonisan antar kelompok yang sejati dalam masyarakat yang beragam tidak terjadi secara spontan (Roach, 2006).

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Multikulturalisme merupakan kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat". Kearifan akan tumbuh jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kepastian hidup yang kodrati. Kearifan dapat tumbuh baik dalam kehidupan diri sebagai individu yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan (Lestari, 2015).

Pendekatan multikulturalisme cocok bagi Indonesia yang multietnis. Proses akulturasi dan asimilasi diperlukan untuk proses integrasi nasional yang kukuh. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjembatani berkembangnya kebudayaan yang berbeda-beda serta mengomunikasikannya sehingga tidak timbul konflik horisontal. Etnis dan kebudayaannya yang berbeda-beda tersebut dapat menjadi potensi berkembangnya kebudayaan nasional

(Hendro, 2013). Dengan pendekatan multikulturalisme ini, semua perbedaan sosio-kultural diakui dan setiap individu dari berbagai kelompok etnis dapat bergabung menjadi satu tanpa harus kehilangan identitasnya.

### **Etnis Tionghoa dan Kedudukannya di Indonesia**

Etnis Tionghoa yang datang ke Nusantara, sampai abad ke-19, berasal dari Provinsi Hokkian, Guangdong, dan Hainan. Pekerjaan mereka di antaranya adalah pedagang, pengrajin, dan sebagian kecil petani (Suryadinata, 1999; Christian, 2017). Hingga sekarang ini, etnis Tionghoa sudah banyak yang merambah bidang lain, seperti pendidikan, penelitian, industri, kesehatan dan lainnya.

Perantauan Tionghoa yang berdagang nampaknya dimulai pada masa Dinasti Ming sekitar abad ke-14 ketika diberitakan mengenai adanya pedagang Tionghoa yang tinggal di Palembang dan temasik (Singapura). Eksodus orang Tionghoa ke Nusantara semakin besar ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Dinasti Ming ke Dinasti Manchu (Marzali, 2011).

Hubungan antara Tionghoa dengan pribumi pascakolonial selalu ditandai dengan prasangka, stigmatisasi, stereotip, segregasi sosial ekonomi dan polarisasi etnis (Sahasrad, 2019). Diaspora Tionghoa menyebabkan negara Indonesia semakin plural dan multikultur. Orang-orang Tionghoa yang datang ke Nusantara mempertahankan kebudayaan asli mereka dan kemudian berakulturasi dengan kebudayaan setempat (Wibowo, t.t). Secara historis, Belanda mempertahankan posisi Tionghoa di antara orang Eropa dan pribumi, sehingga orang Tionghoa tetap dalam "kemurniannya". Belanda membagi golongan dalam masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yaitu golongan bangsa Eropa, golongan bangsa Timur Asing, dan golongan pribumi (Suryadinata, 1999). Inilah struktur masyarakat warisan Kolonial Belanda yang

membuat jarak antara pribumi dengan orang Tionghoa semakin lebar.

Etnis Tionghoa harus tinggal disatu tempat yang ditentukan Pemerintah Kolonial Belanda, yang disebut Pecinan. Lingkungan perkotaan tempat Pecinan berada di luar “sistem kuartal” yang dirancang Belanda dan hanya bisa ke luar dari lingkungannya apabila mendapat ijin atau surat jalan dari pemerintah (Tyson, 2003). Keterbatasan gerak yang dialami oleh etnis Tionghoa tersebut membangkitkan jiwa kemandirian dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Berbagai profesi muncul di antaranya Cina *minding*.

Jejak sejarah yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai kelompok yang berbeda dari penduduk asli dilanjutkan masa Sukarno Pada masa Sukarno, orang Tionghoa dilarang berdagang di daerah pedesaan. Gerakan 30 S tahun 1965 menambah buruk citra etnis Tionghoa karena mereka dituduh memiliki kedekatan dengan komunis. Rezim Orde Baru pada awal pemerintahannya menjalankan politik anti Tionghoa dengan membatasi etnis Tionghoa dalam berbagai hal seperti pemerintahan, militer dan kepolisian, serta tidak bebas berekspresi dalam politik (Tyson, 2003).

Suharto menerapkan kebijakan asimilasi (1966-1998) bagi warga negara Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa untuk dapat berasimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat Indonesia asli. Dengan asimilasi ini, orang keturunan Tionghoa dapat menanggalkan identitas ke-Tionghoa-an mereka dan menyematkan identitas asli bangsa Indonesia. (Suryadinata, 2003). Rekonstruksi yang dilakukan Suharto sebagai *nation building* menfokuskan pada konsep identitas nasional. Identitas yang dimaksud adalah identitas Indonesia. oleh karena itu, identitas yang tidak sesuai dengan identitas Indonesia harus diasimilasikan.

Penekanan terhadap sebuah pemahaman tentang kesatuan Indonesia yang didasari oleh rasa menjadi bagian utuh dari Indonesia dengan

mengesampingkan kepentingan kelompok etnis sendiri. Satu kelompok kecil adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan perilaku eksklusif harus ditinggalkan (Hendro, 2013).

Asimilasi inkorporasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru telah menimbulkan tereliminasi kebudayaan Tionghoa (Wibowo, t.t). Semua warga negara keturunan Tionghoa harus mengikuti kebijakan tersebut demi keberlangsungan hidupnya di Indonesia. Mereka terasing dari kebudayaannya sendiri. Namun ada hal lain yang membuat keterasingan itu semakin nyata, yaitu pembatasan-pembatasan dalam hal penerimaan pegawai, mahasiswa baru, dan yang lainnya.

Hal lain yang masuk dalam asimilasi adalah sekolah dan organisasi politik. Warga negara keturunan Tionghoa hanya diperkenankan sekolah di sekolah nasional, bukan sekolah khusus Tionghoa. Kemudian partisipasi politik hanya boleh tergabung dalam tiga partai politik yang ada, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Suryadinata, 2003).

Suharto menjalankan kebijakan dalam bidang ekonomi, “buka pintu” dengan membuka peluang penanaman modal untuk asing. Modal dari Singapura, Hongkong, dan Taiwan banyak yang masuk ke Indonesia dan ini meningkatkan penggunaan bahasa Mandarin yang meluas (Suryadinata, 1999). Peningkatan pemakaian bahasa Mandarin berbanding lurus dengan makin merebaknya tempat pembelajaran bahasa Mandarin.

Sisi positif dari kebijakan asimilasi adalah penggantian nama Tionghoa ke nama Indonesia, melalui Keputusan Presidium Kabinet no 127/KEP/U/1966. Pada awal Orde Baru, ganti nama tidaklah wajib, namun banyak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang mengganti namanya karena dianggap sebagai bukti kesetiaan terhadap negara

(Suryadinata, 2003). Michael J Kristiono (2016) memandang peng-Indonesia-an tersebut merupakan konstruksi “Liyan” yang berada pada posisi relasional dengan “diri” Indonesia. Orang Tionghoa tidak hanya dianggap sebagai kaum Liyan saja, tetapi juga dianggap sebagai antek-antek negara lain.

Pada masa Orde Baru, orang-orang Tionghoa terlibat dalam dunia politik yang lebih dikenal dengan istilah politik “broker”. Dalam hal ini, kepentingan orang Tionghoa terwakili hanya oleh beberapa orang saja yang memiliki hubungan dengan penguasa. Beberapa lembaga seperti *Centre for Strategic and Internasional Studies* (CSIS) digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi orang-orang Tionghoa (Suryadinata, 1999).

Setelah reformasi, kebijakan asimilasi mulai ditinggalkan. Habibie mengeluarkan intruksi Presiden no 26 tahun 1998 tentang penghapusan istilah pribumi dan non pribumi. Ini merupakan sebuah *political recognition*, politik penerimaan terhadap masyarakat Tionghoa (Wibowo, t.t). Masa Reformasi juga ditandai munculnya partai politik yang anggotanya adalah warga negara keturunan Tionghoa (Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika); beberapa surat kabar berbahasa Tionghoa sudah mendapatkan ijin kembali; dan pengajaran berbahasa Tionghoa sudah diijinkan walaupun jumlahnya terbatas untuk perguruan tinggi saja. Identitas Tionghoa mulai bangkit lagi di antara warga negara keturunan (Suryadinata, 2003).

Meskipun pasca reformasi pengakuan terhadap etnis Tionghoa dalam beberapa hal meningkat, namun kesenjangan antara pribumi dengan Tionghoa masih terjadi. Sentimen anti Cina masih kuat melekat dikalangan pribumi. Orang Tionghoa belum sepenuhnya diterima karena dianggap warga keturunan asing yang masih mempraktekkan budaya sendiri (Chong, 2018). Inilah yang kemudian menyebabkan orang Tionghoa

menjadi sasaran amuk massa jika ada kerusuhan sosial. Mely G Tan (1986) menyebut hubungan antara pribumi dengan Tionghoa sebagai sebuah “*latent hostility*” (Tan, 1987)

Pada masa KH Abdurrahman Wahid, eksistensi Tionghoa lebih diperkuat. Keputusan Presiden no 14/1967 yang membatasi kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi etnis Tionghoa dicabut (Tyson, 2003). Libur nasional untuk perayaan Imlek ditetapkan, agama Konghucu menjadi agama yan diakui negara, surat kabar berbahasa Tionghoa pun semakin banyak, dan bahasa Tionghoa diijinkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah (Wibowo, t.t).

Meski rezim berganti, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) masih diberlakukan untuk warga negara keturunan Tionghoa, hingga setelah reformasi. SKBRI merupakan bukti status kewarganegaraan bagi warga negara asing (Kristiono, 2016). SKBRI yang dimulai sejak tahun 1958, diperlukan untuk keperluan kredit dan ijin usaha, bahkan untu mendaftar ke perguruan tinggi (Tyson, 2003). Sejatinya, warga negara keturunan Tionghoa yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia tidak perlu mengurus dokumen untuk pembuatan SKBRI. Ini menunjukkan masih adanya diskriminasi terhadap orang Tionghoa.

Apabila multikulturalisme diterapkan dalam kebijakan, multikulturalisme mencakup serangkaian kebijakan negara formal dengan dua tujuan utama yaitu untuk memelihara keselarasan antaretnik dan menstrukturkan hubungan antara negara dan etnis minoritas (Suryadinata, 2003). Di Indonesia, multikulturalisme merebak sekitar tahun 1990-an sebagai reaksi atas penyeragaman yang dilakukan oleh Orde Baru (Wibowo, t.t). Lamanya pemerintahan Orde Baru menyebabkan sendi-sendi demokrasi menjadi renggang.

Posisi orang Tionghoa yang menjadi sasaran kemarahan disebabkan oleh dalamnya demonisasi (Orang Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai setan-setan

tamak yang mengeksploitasi kaum pribumi) Orde Baru. Sedemikian negatifnya citra yang dikonstruksikan terhadap orang-orang Tionghoa sehingga membekas hingga saat ini. Kondisi sosial mereka termarginalkan akibat skenario domestik dan internasional yang dilakukan pemerintah (Kristiono, 2016). Politik seperti ini pernah dilakukan Belanda dengan mengintensifkan beberapa hal, pertama mengisolasi orang Tionghoa dalam sebuah pemukiman khusus sehingga tidak dapat berhubungan dengan komunitas lain. Kedua, menciptakan kondisi kecemasan terus menerus dalam psikologi orang-orang Tionghoa. Ketiga, Belanda mengikat orang-orang Tionghoa dengan berbagai persyaratan dan kompensasi (Sahasrad, 2019).

Orang Tionghoa di Indonesia sering mengalami berbagai masalah. Permasalahan tersebut di antaranya masalah hubungan sosial; budaya yang menyangkut identitas; dan masalah ekonomi yang menyangkut kesempatan, distribusi, dan penguasaan sektor ekonomi. Kesemuanya itu menyebabkan terpojoknya posisi orang-orang Tionghoa dalam krisis yang sering menjadi “kambing hitam” (Wibowo, t.t). Ketika terjadi kerusuhan Mei 1998, orang Tionghoa menjadi sasaran dan menurut Daniel Lev bahwa pola seperti ini pernah terjadi pada tahun 1740, VOC memobilisasi massa orang Jawa untuk membantai minoritas dengan membakar rumah-rumah orang Tionghoa (Sahasrad, 2019).

Peristiwa pembantaian etnis Tionghoa tahun 1740 dikenal dengan sebutan *The Chinese Massacre* atau juga dikenal dengan Tragedi Berdarah Angke. Orang-orang Tionghoa disekitar Batavia dituduh oleh Gubernur Jenderal Valckenier akan menyerbu pusat VOC. Oleh karena tuduhan itulah, kemudian orang-orang Tionghoa dibantai. Pada masa itu, jumlah perantaraan Tionghoa di Batavia jumlahnya cukup banyak. Mayoritas mereka bekerja sebagai kuli dan tukang (Marzali, 2011). Mobilisasi orang-orang Tionghoa melawan VOC menunjukkan

jumlah yang tidak sedikit. Kejadian ini tentunya kejadian yang sangat traumatis bagi orang-orang Tionghoa.

Hal yang menarik dari orang Tionghoa adalah adanya beberapa identitas pembeda antara subetnik Tionghoa yang lain, pertama, ada tujuh dialek bahasa Tionghoa: dialek Utara, dialek Wu, dialek Xiang, dialek Gan, dialek Hakka, dialek Min, dan dialek Kanton. Dialek tersebut berasal dari asal nenek moyang mereka. Perbedaan dialek tersebut membentuk identitas subetnik Tionghoa di Indonesia (Christian, 2017). Banyaknya subetnik Tionghoa tentu saja memperkaya hasanah budaya Indonesia meski dalam domain yang lebih khusus.

Dalam literatur Sosiologi, kelompok warga keturunan Tionghoa Indonesia disebut dengan istilah *ethnic group*. Penggolongan kelompoknya dilakukan oleh mereka sendiri dengan melihat persamaan ciri latar belakang sosio kulturalnya atau oleh orang lain yang melihat kesamaan cirinya. Ciri-cirinya antara lain: memiliki sistem kepercayaan yang khas yang mereka bawa dari asalnya; memiliki dialek bahasa Tionghoa; memiliki pengalaman yang sama sebagai migran; asal yang sama; dan keturunan yang sama (Marzali, 2011).

Pembeda identitas subetnik yang kedua adalah wilayah domisili. Domisili menjadi pembeda identitas karena setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena dipengaruhi oleh budaya setempat. Budaya masing-masing subetnik terkadang dijadikan pertimbangan bagi orang tua-orang tua untuk memilih jodoh anaknya (Christian, 2017). Seperti pepatah, jodoh harus melihat bobot, bibit, dan bebetnya, maka dalam perjodohan di kalangan Tionghoa juga mempertimbangkan asal usul subetnik calon pasangan anaknya.

Selain dialek dan domisili, faktor pembeda identitas yang ketiga adalah marga atau klan. Nama marga selalu disematkan dalam nama seorang Tionghoa. Marga menjadi identitas antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan

juga sebagai penanda subetnik Tionghoa itu sendiri. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan marga yang sama (Christian, 2017). Perkumpulan sering dibentuk oleh marga yang sama, sehingga ikatan kekerabatan di antara mereka semakin erat yang mengarah pada saling bantu jika ada anggota marga yang mengalami kesulitan.

Perbedaan generasi tua dan muda Tionghoa di Indonesia yaitu generasi Tua yang “*being*” sedangkan generasi muda lebih “*becoming*”. Generasi tua masih memegang adat istiadat serta menggunakan dialek Tionghoa. Berbeda dengan generasi muda yang sudah mulai bahkan senang berbaur dan mengikuti budaya lain seperti budaya Barat atau budaya Asia lainnya (Christian, 2017). Generasi muda tentunya beralasan mengikuti perkembangan jaman yang sudah berorientasi ke Barat bukan berorientasi pada bangsa sendiri.

Bagaimana dengan kedudukan orang-orang Tionghoa masa sekarang dalam bingkai multikultural Indonesia? Masyarakat keturunan Tionghoa sebagai sebuah kelompok etnik memang tidak akan lenyap meskipun di negara Indonesia ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian pemersatu bangsa untuk tidak saling mementingkan kelompoknya masing-masing. Dikotomi pribumi dan nonpribumi pun seolah-olah tidak bisa hilang. Tetapi hal ini pun sebenarnya terjadi pada suku bangsa lain yang ada di bumi pertiwi. Masing-masing memiliki identitas dan juga ego sosial kultural dan inilah yang terkadang menjadi penyulut timbulnya gesekan di antara mereka.

Munculnya benih-benih percekocokan sangat mungkin terjadi pada masyarakat multikultur yang menyikapi perbedaan sebagai pemisah. Masyarakat yang telah lama hidup dalam heterogenitas bukan berarti telah kebal dengan gesekan etnis, budaya, sosial, agama, ekonomi atau lainnya. Pembentukan masyarakat Indonesia yang multikultural tidak bisa *taken for granted* atau *trial and error*, tetapi dengan upaya yang sistematis, programis,

terintergrasi, dan berkesinambungan. Salah satu strateginya adalah dengan pendidikan multikultural yang dapat diterapkan dalam pendidikan baik formal maupun nonformal (Lestari, 2015). Perbedaan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat Indonesia karena pada dasarnya memang komposisi masyarakat Indonesia heterogen. Perbedaan bisa menjadi pemecah belah apabila tidak dipupuk semangat kebersamaannya. Begitu pula sebaliknya, perbedaan bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia apabila dipelihara dan dikembangkan bersama-sama.

## SIMPULAN

Masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural tidak dapat dipaksakan untuk menjadi homogen demi integrasi nasional karena kemajemukan itu adalah hal yang sudah tidak dapat dihindari. Warisan sejarah tidak dapat dipungkiri. Sejak masa kolonial Belanda, kemajemukan masyarakat di Nusantara sudah ada, bahkan kemajemukan itu dijadikan alat untuk mengadu domba masyarakat Indonesia. Belanda mengklasisfikasikan masyarakat berdasarkan etnis yang secara tidak langsung menempatkan etnis tersebut pada strata masing-masing. Golongan orang Eropa terpisah dengan Timur Asing, dan juga pribumi. Sejak saat itulah, muncul jurang antara penduduk asli dengan keturunan.

Rezim berganti rezim setelah penjajahan hilang dari Indonesia, namun gap antara etnis Tionghoa dengan penduduk asli masih ada walau pernah dilakukan upaya asimilasi dan integrasi. Ini terlihat ketika terjadi krisis, etnis Tionghoa sering menjadi sasaran kemarahan penduduk asli. Sesungguhnya, iklim politik Indonesia masa sekarang pun sudah tidak cocok dengan adanya dikotomi antara pribumi (warga negara asli) dan nonpribumi (warga negara keturunan Tionghoa). Walaupun orang-orang

Tionghoa tersebut tidak mudah melepaskan kebudayaan asli mereka. Hal yang diperlukan saat ini adalah bahwa masing-masing masyarakat menghormati perbedaan dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chong, W. (2018) *Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia Democratisation and Ethnic Minorities*. Hong Kong: HKU Press.
- Christian, S. A. (2017) 'Identitas budaya orang tionghoa indonesia', 1(1), pp. 11–22.
- Fadhli, Y. Z. (2013) *Hak Asasi Kelompok Minoritas di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah)*. UII Yogyakarta.
- Fadhli, Y. Z. (2014) 'Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan', *Konstitusi*, 11(2), pp. 352–370.
- Hanafy, M. S. (2015) 'Pendidikan Multikultural dan Dinamika Ruang Kebangsaan', 3(1), pp. 119–139.
- Hendro, E. P. (2013) 'Multikulturalisme Sebagai Model Integrasi', *Sabda*, 8, pp. 34–42.
- Kristiono, M. J. (2016) *Tionghoa Di Indonesia ( From Tionghoa To China : A Historical Review Of The Demonization Of Chinese Ethnicity In Indonesia ) Isu Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Indonesia masih banyak menjadi sorotan dunia internasional . Pada level internasional , isu HAM a*.
- Lestari, G. (2015) 'Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural', *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), pp. 31–37.
- Marzali, A. (2011) 'Pemetaan sosial-politik kelompok etnik cina di indonesia', *Masyarakat Indonesia*, XXXVII(2), pp. 47–84.
- Roach, K. (2006) 'National Security, Multiculturalism and Muslim Minorities', *Singapore Journal of Legal Studies*, pp. 405–438.
- Sahasrad, H. (2019) 'Colonial Structure , Chinese Minority and Racial Violence in Indonesia : A Social Reflection', *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 2(2), pp. 209–221.
- Shofa, A. M. A. (2016) 'Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila', *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), pp. 34–41.
- Suryadinata, L. (1999) 'Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia', *Wacana*, 1(2).
- Suryadinata, L. (2003) 'Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa : dari Asimilasi ke Multikulturalisme', *Antropologi Indonesia*, 71, pp. 1–12.
- Tan, M. G. (1987) 'The Role of Ethnic Chinese Minority in Developpment : The Indonesian Case', *Southeast Asian Studies*, 25(3), pp. 63–82.
- Tyson, A. (2003) 'Realities Of Discrimination In Indonesia ':, *JAP*, 2(2), pp. 203–221.
- Wibowo, P. (t.t) 'Tionghoa Dalam Keberagaman Indonesia : Sebuah Perspektif Historis', in *Unity, Diversity, and Future*, pp. 640–657.

Wijayanti, Y. (2022). Kedudukan Etnis Tionghoa Dalam Multikulturalisme Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Artefak*, 9 (2), 139 - 148